

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan didefinisikan sebagai alat penting yang mampu dimanfaatkan dalam menghasilkan informasi tentang status keuangan suatu organisasi atau instansi dan hasil kegiatannya, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan kemudian mampu digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga dapat disebut sebagai bagian dari bentuk perwujudan tanggung jawab kinerja keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan serta tahunan anggota perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang: a) pengawasan, b) keuangan, c) perencanaan, d) akuntabilitas kerja, e) pengadaan barang atau jasa, dan f) administrasi Pembangunan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika laporan keuangan tersebut mampu menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Selain itu, ada beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus terkandung sehingga dapat dinyatakan berkualitas yaitu mudah dipahami, relevan, dapat dibandingkan, konsisten, netralitas, serta tepat waktu. Hal tersebut didukung Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, di mana peraturan ini menetapkan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diandalkan sebagai kriteria dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini laporan keuangan layak dinyatakan relevan jika memberikan informasi yang berdampak pada kebijakan pengguna dengan meninjau kembali terkait aktivitas

atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan masa kini serta memprediksi masa depan. Sedangkan dapat diandalkan atau andal berarti laporan keuangan harus berisi informasi yang tidak menyesatkan atau salah saji secara material, benar dan dapat diverifikasi atau dibuktikan. Dapat dibandingkan atau *comparable* artinya laporan keuangan yang mampu ditandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya akan dianggap lebih berguna. Dapat dipahami (*understandable*) yaitu isi informasi laporan keuangan harus dapat dan atau mudah dipahami oleh pengguna dengan bentuk penyajian laporan keuangan yang disesuaikan dengan pemahaman pengguna. Q.S Al-Ahzab/33: 70 telah menjelaskan bahwa andal merupakan salah satu karakteristik dari laporan keuangan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan sebuah keharusan saat menyajikan dan melaporkan laporan keuangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

Makna ayat tersebut mengandung perintah dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman agar berkata jujur dan benar, tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dalam penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan kejujuran dalam melakukan penyusunan dan pelaporan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dinyatakan berkualitas salah satunya adalah memiliki karakteristik yang andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas, tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan

material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah diverifikasi.

Lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor timbulnya kecurangan di daerah. Sistem pengawasan yang ada di daerah terdiri dari pengawasan internal, yakni pengawasan yang dilaksanakan pihak otoritas atau pihak yang berwenang dengan pengawasan independen serta pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan masyarakat maupun badan konstitusional seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan pada laporan keuangan dan data-data yang belum tersaji secara sesuai dengan peraturan merupakan salah satu fenomena yang mendorong masyarakat untuk menuntut penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk menerapkan akuntabilitas yang baik pada penyusunan dan pelaporan keuangan sebagai bagian dari wujud pertanggungjawaban.

Tabel 1.1 Daftar Jenis dan Kelompok Temuan BPK-RI tahun 2022

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	23
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	65
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	12
1	SOP/ kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	1	
2	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1	
Total		17	100

Sumber: bpk.co.id (2022)

Badan Pengawas Keuangan (BPK) bertugas memeriksa dan memberi penilaian berupa opini terhadap laporan keuangan pemerintahan. Adapun maksud dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini yaitu dalam rangka menyatakan pendapat atas kewajaran informasi laporan keuangan. Ada lima macam pendapat atau opini yang dikeluarkan BPK yaitu, opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tabel 1.2 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wilayah D.I.Y

No	Tahun	Opini Audit	Opini Audit
1	2017	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2018	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2019	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2020	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2021	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2022	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: yogyakarta.bpk.go.id (2023)

Berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah kota Yogyakarta memang terus mendapatkan opini WTP (*unqualified opinion*) enam kali secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai 2022. Walaupun demikian, BPK masih menemukan beberapa masalah pada laporan keuangan yang menyebabkan dipertanyakannya kewajaran dan tingkat akuntabilitas dari pelaporan keuangan tersebut. Isma Yatun, Ketua BPK RI dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna di DPRD DIY Kamis (13/4), mengungkapkan isu yang ditindak lanjuti oleh BPK salah satunya adalah realisasi belanja modal oleh Pemda DIY sebesar Rp 108,6 miliar untuk pekerjaan Pembangunan PPI Pantai Gesing yang melebihi realisasi fisik per tanggal neraca 31 Desember 2022 sebesar 90% atau sekitar Rp 9,98 miliar yang diperhitungkan sebagai kemajuan pekerjaan. Selain itu, BPK juga menyoroti tentang penentuan besaran tunjangan perupahan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang belum sesuai dengan ketentuan tentang perhitungan berdasarkan hasil appraisal. Kemudian isu ketiga yang ditemukan BPK adalah terkait pemberian paket sembako senilai Rp 4,75 miliar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama pandemi COVID-19 yang belum tertib.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yakni Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan salah satu dasar dari sebuah integritas keuangan. Sehingga sumber daya manusia yang berkualitas atau berkompoten mempunyai peran yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki integritas dan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang ada pada Keputusan Kepala BKN No. 46 A Tahun 2003 mengenai dasar untuk menyusun standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS), kompetensi ini diartikan sebagai ciri serta kemampuan seorang PNS khususnya keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang diterapkan ketika menjalankan amanah yang berkaitan dengan jabatannya. Bentuk kompetensi SDM salah satunya dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap BPK-RI. Menurut Kabib dkk., (2021) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa kualitas LKPD dapat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Namun, pendapat itu bertentangan dengan Suliyantini dkk., (2017) dengan penelitian yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan faktor yang mampu memberikan dampak pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan merupakan sistem pengendalian intern. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 BPK-RI mengungkap 3.490 temuan yang mencakup 5.266 permasalahan atau isu senilai Rp25,85 triliun, meliputi 1.295

(24,6%) isu terkait sistem pengendalian intern (SPI) yang lemah serta 1.766 (33,5%) isu ketidakpatuhan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) senilai Rp14,65 triliun, dan 2.205 (41,9%) isu mengenai kehematan, keefisienan, serta keefektifan senilai Rp11,20 triliun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses terpadu atas tindakan atau aktivitas pimpinan instansi serta seluruh pegawai yang dilaksanakan secara terus menerus untuk meyakinkan atas wajarnya kebenaran laporan. Bangsa (2018) menyatakan apabila sistem pengendalian internal yang baik tanpa adanya dukungan loyalitas pegawai tidak akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Pernyataan ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan di suatu organisasi individu cenderung mengesampingkan kepentingan pribadinya dan lebih berfokus atau berusaha untuk mencapai tujuan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Penelitian oleh Shofa dkk., (2022) membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal. Berikut ini disajikan daftar temuan BPK-RI mengenai kelemahan sistem akuntansi, pelaporan, serta sistem pengendalian intern.

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sudah memadainya kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah seperti penggunaan *software*, *database*, komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*), dan jenis lainnya secara optimal, sehingga akan berpengaruh terhadap proses transaksi yang lebih cepat dengan

akurasi perhitungan yang tinggi. Pangestu dkk., (2019) membuktikan pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh, signifikan dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, pada penelitian Gasperz (2019) menunjukkan hasil yang bertentangan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yakni prinsip akuntansi yang digunakan pada saat menyajikan serta menyusun LKPD. Instansi pemerintah harus melakukan penyusunan laporan keuangan dengan memenuhi standar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas penyusunannya wajib berpedoman pada peraturan yang ada dalam standar akuntansi yang ditetapkan saat ini, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus berpedoman pada SAP yang telah disahkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ikriyati & Aprila (2019) juga menyatakan bahwa faktor penerapan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan arah positif. Indonesia menerapkan standar akuntansi pemerintah berdasarkan akuntansi akrual. Sistem akuntansi berbasis akrual mencatat pendapatan dan pengeluaran (beban) saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas pembayaran dilakukan atau diterima (Eveline, 2016).

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan diduga dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Komitmen yang kokoh pada suatu organisasi mampu menimbulkan kepercayaan serta dukungan dan kesetiaan pegawai pada nilai-nilai serta tujuan yang menjadi capaian suatu instansi atau organisasi. Dalam penelitian ini komitmen organisasi diduga dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber

daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan karena komitmen tersebut memengaruhi sejauh mana sumber daya manusia (SDM) berkontribusi secara efektif dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selain kompetensi SDM, komitmen organisasi juga dapat memperkuat hubungan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan karena komitmen organisasi terhadap kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dapat memastikan bahwa interpretasi dan implementasi standar tersebut dilakukan secara tepat dan konsisten. Komitmen ini memungkinkan organisasi untuk mengatasi interpretasi yang kompleks dan memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian komitmen organisasi terhadap investasi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Sistem ini dapat membantu otomatisasi proses akuntansi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, komitmen organisasi terhadap sistem pengendalian intern dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap proses akuntansi. Dengan demikian, pelaporan keuangan dapat dikontrol dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan yang dapat memengaruhi kualitas laporan. Hal tersebut searah dengan penelitian Ardy dkk., (2019) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasional memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah positif.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan Yaqin & Jatmiko (2018) dan (E. Rahmawati dkk., 2022). Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai

berikut; a) obyek penelitian terdahulu berada di OPD/SKPD Kabupaten Biak Numfor sedangkan pada penelitian ini berfokus pada OPD Kota Yogyakarta, b) penelitian terdahulu meneliti kontribusi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dan pada penelitian ini penulis menambahkan 2 variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, c) penelitian terdahulu menggunakan program aplikasi SPSS sebagai alat pengujian, sedangkan pada penelitian ini menggunakan program aplikasi *SmartPLS* versi 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia?
2. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern?
3. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi?
4. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
7. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
8. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia melalui komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern melalui komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi melalui komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah melalui komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan tambahan literatur pada penelitian akuntansi khususnya mengenai laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan informasi faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya pada instansi daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan komitmen organisasi sebagai indikator evaluasi.

b. Bagi Investor

Investasi di organisasi perangkat daerah merujuk pada upaya alokasi sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas organisasi tersebut. Penelitian di OPD dapat membantu investor dalam mengevaluasi risiko investasi mereka. Dengan memahami tata kelola, manajemen risiko, dan kondisi keuangan OPD, investor dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja investasi mereka.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka mampu ikut berkontribusi positif dalam rangka perubahan atau perbaikan ke arah yang lebih baik.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi sektor publik, serta memberikan referensi khususnya dalam mengkaji topik-topik yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis